



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS SOSIAL KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**Dinas Sosial Kota Jambi
Jln. Jend. Sudirman No. 156 Telp. 0741-24193 Fax. 0741 - 31682
JAMBI - 36128**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas berkat Rahmad – Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Jambi 2024 – 2026.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu organisasi yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada Tahun 2025.

Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu tentunya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk kesempurnaan Laporan ini kedepan.

Jambi, Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL



YUNTA ANDRAWATI, AP, MP, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740607 199403 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan..... 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN
LALU (2023)..... 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Jambi 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi 13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota
Jambi 14

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 21

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Jambi 22

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 22

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Jambi 23

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Jambi 25

BAB V Penutup 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam rangka peningkatan harkat, martabat dan kualitas hidupnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.

Permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meningkat, seiring dengan derasny arus globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia, Sementara itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan social terus meningkat dan professional seiring dengan dengan Hak-haknya selaku warga Negara. Oleh sebab itu berbagai dampak positif dan negative dari persoalan sosial semakin meningkat.

Pembangunan kesejahteraan sosial ke depan akan semakin kompleks dan multi dimensional, karena masalah social berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lapisan bawah, yang dampaknya langsung berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti disintegrasi sosial, diskriminasi sosial, kesenjangan sosial, sistem nilai budaya bangsa (kesetiakawanan sosial) dan sebagainya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya masalah kesejahteraan sosial diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif, dengan membuat rencana berupa RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 Dinas Sosial Kota Jambi sebagai acuan sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan landasan hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- 3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 7) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
- 8) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Daerah Propinsi, dan Kabupaten/Kota;
- 9) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;
- 10) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi;
- 11) Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 ini merupakan salah satu dari serangkaian proses pekerjaan penyusunan program pembangunan daerah. Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2025 adalah untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- b. Untuk Menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Jambi .

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial dan ini dituangkan kedalam 5 (Lima) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud & Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Jambi
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Sosial Kota Jambi
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Jambi
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

TAHUN LALU (2023)

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Perangkat Daerah Dinas Sosial terdiri dari satu sekretariat dan empat bidang. Hasil Renja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Secara rinci hasil kegiatan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Jambi dan
Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2023 Kota Jambi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kota Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Dengan Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan Tahun Januari 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									

1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	B	6.421.922.349	6.151.162.973	95,78			
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			58.035.250	57.049.870	98,30	57.584.350		
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			4.418.701.855	4.233.477.071	95,81	5.027.691.385		
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			33.010.000	32.560.000	98,64	0		

1.06.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Adminstras i Kepegawaia n			158.100.000	154.511.907	97,73	144.700.000		
1.06.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Adminstras i Umum			326.507.298	324.843.938	99	464.222.096		
1.06.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah			298.190.652	278.984.000	93,56	165.337.921		
1.06.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			520.843.600	489.214.2 57	93,93	564.547.600		
1.06.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Barang			608.533.694	580.521.9 30	95,40	441.030.000		

		Milik Daerah								
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PPKS			1.771.106.770	1.744.738.226	98,51	1.735.733.200		
1.06.02 .2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan			28.955.910	27.036.910	93,37	26.951.800		
1.06.02 .2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	Jumlah PSKS yang			1.742.150.860	1.717.701.316	98,60	1.708.781.400		

	Sosial Kabupaten/Kota	Daerah diberdayaka n								
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			53.063.080	31.708.980	59,76	46.540.000		
1.06.03 .2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kota Jambi untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	Jumlah OT yang di pulangkan			53.063.080	31.708.980	59,76	46.540.000		
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh			1.472.214.645	1.385.478.215	94,11	1.229.308.340		

		bantuan sosial dan Di Layani								
1.06.04 .2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani			729.707.844	693.044.105	94,98	657.350.000		
1.06.04 .2.02	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan			742.506.801	692.434.110	93,26	571.958.340		

	Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	an Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti yang di layani								
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani			1.970.315.781	1.754.218.811	89,03	2.108.740.900		
1.06.05 .2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	jumlah anak terlantar			27,034,405	26,265,510	97,16	25.027.500		
1.06.05 .2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Pengelolaan			1.943.281.376	1.727.953.301	88,92	2.083.713,400		

	Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin								
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat			700.486.56 2	609.320.7 40	86,99	693.309.200		
1.06.06 . 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang ditangani			351.822.08 0	279.753.9 40	79,52	315.394.200		
1.06.06 . 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Penyelengg araan Pemberdaya an Masyarakat terhadap			348.664.48 2	329.566.8 00	94,52	377.915.000		

		Kesiapsiaga an Bencana								
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai target/standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam Sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.	Persentase PPKS di Luar Panti yang Tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %	85 %	100 %	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan pelayanan jasa, Kota Jambi tumpuan bagi penduduk untuk menggantungkan hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik. Pendatang dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk kota sekaligus menambah permasalahan sosial dan Tenaga Kerja yang semakin semakin kompleks. Ke depan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan bagian tidak bisa terpisahkan sebagai salah satu dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi.

Karena itu pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap distribusi dari hasil sumber-sumber ekonomi.

Kedepan kita akan mengupayakan pengembangan program jaminan sosial dan bursa kerja oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial seperti perhatian terhadap pekerja sekaligus penyuluh sosial baik dari unsur masyarakat maupun pegawai negeri yang saat ini belum maksimal.

Isu-isu Strategis yang berkembang tentang Masalah Sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya kapasitas aparatur daerah, keuangan dan asset daerah serta implementasi reformasi birokrasi belum optimal.
- 2) Rendahnya tingkat kedisiplinan ketaatan masyarakat kepada peraturan perundang-undangan, norma agama serta nilai-nilai sosial budaya.
- 3) Meningkatnya jumlah PPKS seiring dengan penambahan penduduk
- 4) Rendahnya akses dan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial
- 5) Belum terpenuhinya fasilitas Pelayanan dan Rehabilitasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, lansia terlantar, korban Napza, Orang dengan HIV / AIDS dan lain-lain

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Sosial Kota Jambi perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijaksanaan Program operasional dan kegiatan-kegiatan.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Sosial tidak terlepas dari kondisi yang mendukung kegiatan dan faktor-faktor lain dari kegiatan dimaksud. Kondisi

yang akan diuraikan ini dilakukan melalui beberapa analisis yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal.

A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

➤ Kekuatan (Strength)

- a. Stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terjaga dengan baik.
- b. Sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah, Kelembagaan Organisasi, Masyarakat dan Pelaku Dunia Usaha dalam mengatasi masalah-masalah Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan
- c. Jumlah aparatur SKPD yang jumlahnya relatif cukup memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Peningkatan peran / partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah-masalah Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan.
- e. Tersedianya Anggaran Dana yang bersumber dari APBD Kota Jambi untuk mendukung Program Kegiatan dan Tugas– tugas operasional.
- f. Terbentuknya struktur kelembagaan Dinas Sosial Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi

➤ Kelemahan (Weaknesses)

- a. Belum memadainya produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Jambi.
- b. Masih banyaknya penduduk yang berada pada kelompok miskin.
- c. Ketersediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang belum akurat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
- d. Belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal Aparatur Pemda yang berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
- e. Belum optimalnya dukungan dan peran serta aktif *stakeholders* daerah (dunia usaha-masyarakat) dalam pengelolaan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan social .
- f. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah berdampak luas terhadap masalah sosial lainnya seperti rendahnya semangat kerja, kurang kreatif dan kurang percaya diri.

B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

➤ Peluang (Opportunity)

- a. Potensi sumber daya alam yang masih tersedia yang membuka peluang dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pola pendekatan secara kelompok dalam bentuk KUBE dan peningkatan Usaha Ekonomi Produktif;
- b. Keterlibatan dan peran serta aktif Orsos ditengah – tengah masyarakat & Lembaga masyarakat yang semakin baik dan bekerja sama dalam menangani masalah kesejahteraan sosial seperti yayasan – yayasan, LSM Orsos dan Karang Taruna sesuai fungsi sosialnya
- c. Pengelolaan Sumber Daya Personil dalam mendukung dan membantu tugas-tugas pelayanan Kesejahteraan sosial (Pegawai, Tagana, PSM,)
- d. Partisipasi dunia usaha dilakukan melalui program corporate social responsibility (CSR) merupakan implementas dan tanggungjawab & Kepedulian perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan dan pelayanan kesejahteraan social.

➤ Ancaman (Threats)

- a. Tingkat kemiskinan penduduk yang relatif tinggi sehingga menimbulkan permasalahan sosial, seperti : Gepeng (gelandangan dan pengemis), Fakir Miskin, Anak terlantar, Anak Jalanan, Korban Narkoba, Korba HIV/AIDS, Keluarga Rentan, Lansia Terlantar & WTS;
- b. Kurangnya Pemanfaatan Potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan social dan tenaga kerja,;
- c. Rendahnya Tingkat pendapatan masyarakat yang berdampak luas terhadap masalah sosial lainnya seperti rendahnya semangat kerja, kurang kreatif , mandiri dan kurang percaya diri.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RPD

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RPD tahun 2026 Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	8.410.266.446	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	8.410.266.446	
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi	- Persentase Pemberdayaan	100 %	2.178.000.000	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi	- Persentase Pemberd	100 %	2.178.000.000	

			Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PPKS					ayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PPKS			
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		- Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 %	72.600.000	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		- Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak	100 %	72.600.000	

								Kekerasan			
4.	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan dilayani	100 %	2.934.250.000	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan dilayani	80 %	2.934.250.000	
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani dan	100 %	1.815.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani	80 %	1.815.000.000	

			Persentase Fakir Miskin yang Didata dan dilayani					dan Persenta se Fakir Miskin yang Didata dan dilayani			
6.	Program Penanganan Bencana		Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat	100 %	1.240.250.000	Program Penanganan Bencana		Persentase Penangana n Bencana saat tanggap darurat	80 %	1.240.250. 000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan pembangunan daerah di Kota Jambi membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme E-planing musrenbang. Sistem perencanaan tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari level terbawah sampai tingkat Kota. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada awal tahun 2022, tidak terdapat usulan kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui Dinas Sosial Kota Jambi dengan Program Indikator Kecamatan. Namun ada beberapa usulan dari hasil musrenbang kecamatan yaitu Non Pagu Indikator Kecamatan yang merupakan kegiatan rutin program kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Jambi yaitu pengusulan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Pelatihan Bagi Disabilitas, Bantuan Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Tongkat Kruk, Etalase Jualan Sarapan, Kemeja Lapangan Karang Taruna, Sound Senam Lansia, Seragam Karang Taruna, Seragam Lansia, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Pengolahan Makanan Tradisional.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2025 adalah: MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG DENGAN MENEKANKAN TERBANGUNNYA STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH BERLANDASKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF DI BERBAGAI WILAYAH YANG DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional.
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

TABEL
TUJUAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

No	Tujuan Dinas Sosial	Indikator Tujuan Dinas Sosial	Target Kinerja Tujuan Dinas Sosial Tahun 2025
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Korban Bencana Alam dan Sosial.	Tingkat Pelayanan Kepada Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %
2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Keluarga Miskin	Persentase Penduduk Miskin	100 %

	dan Orang Tidak Mampu.		
3	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Persentase PPKS yang Tertangani	100 %

TABEL
SASARAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

No	Sasaran Dinas Sosial	Indikator Sasaran Dinas Sosial	Target Kinerja Sasaran Dinas Sosial
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Pelayanan Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %
2	Peningkatan Pelayanan Kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu	Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu	100 %
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar Diluar Panti	Persentase PPKS Terlantar Diluar Panti yang Tertangani	100 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 terdiri dari Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari 6 Program, 17 Kegiatan 44 Sub Kegiatan dengan Total Rencana Anggaran sebesar Rp. 11.355.000.000

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Recana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Jambi	100 %	6.509.508.648	APBD		7.753.152.528	Kota Jambi
2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	Kota Jambi	BB	60.809.350	APBD		111.009.050	Kota Jambi
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Kota Jambi	100 %	4.529.820.000	APBD		5.011.577.450	Kota Jambi
2.03	Administrasi Barang	Tertib Administrasi	Kota	100 %	40.490.000	APBD		44.539.000	Kota

	Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jambi						Jambi
2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	Kota Jambi	100 %	126.500.000	APBD		144.000.00	Kota Jambi
2.04	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Kota Jambi	100 %	326.507.298	APBD		409.158.028	Kota Jambi
2.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	100 %	250.000.000	APBD		575.000.000	Kota Jambi
2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan	Kota Jambi	100 %	502.012.000	APBD		502.662.000	Kota Jambi
2.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	100 %	663.370.000	APBD		955.207.000	Kota Jambi

	Daerah								
02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PPKS	Kota Jambi	100 %	1.800.000.000	APBD		1.980.000.000	Kota Jambi
2.01	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin PUB	Kota Jambi	100 %	55.000.000	APBD		60.500.000	Kota Jambi
2.02	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	Kota Jambi	100 %	1.745.000.000	APBD		1.919.500.000	Kota Jambi
03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Jambi	100 %	60.000.000	APBD		66.000.000	Kota Jambi

2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase OT yang di pulangkan	Kota Jambi	100 %	60.000.000	APBD		66.000.000	Kota Jambi
04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial yang di layani	Kota Jambi	100 %	1.450.000.000	APBD		2.667.500.000	Kota Jambi
2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani	Kota Jambi	100 %	750.000.000	APBD		1.127.500.000	Kota Jambi

2.02	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti yang di layani	Kota Jambi	100 %	700.000.000	APBD		1.540.000.000	Kota Jambi
05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang dilayani dan Persentase Fakir Miskin yang Didata dan dilayani	Kota Jambi	100 %	1.350.000.000	APBD		1.650.000.000	Kota Jambi
2.01	Pemeliharaan Anak- Anak terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang dilayani	Kota Jambi	100%	50.000.000	APBD		55.000.000	Kota Jambi
2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin	Kota Jambi	100 %	1.300.000.000	APBD		1.595.000.000	Kota Jambi

06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat	Kota Jambi	100 %	1.025.000.000	APBD		1.127.500.000	Kota Jambi
2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	Kota Jambi	100 %	600.000.000	APBD		660.000.000	Kota Jambi
2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Kota Jambi	100 %	425.000.000	APBD		467.500.000	Kota Jambi
TOTAL					12.194.508.64 8			14.227.661.57 8	

BAB V

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Jambi diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan ke seluruh aparat dalam Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi. Rencana Kerja ini memungkinkan seluruh anggota organisasi dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam program dan kegiatan selama tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Jambi ini merupakan rangkaian rencana program kegiatan untuk Tahun 2025 yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Jambi sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional, hal ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Jambi. Untuk ini diharapkan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Jambi yang direncanakan akan terlaksana dan terkoordinasi dengan baik serta dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis dalam kurun waktu tersebut akan senantiasa mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana ini, semoga dapat bermanfaat dan dalam menjalankan tugas kedepannya mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas yang diemban dalam kegiatan pembangunan Daerah Kota Jambi.

Jambi, Februari 2024

KEPALA DINAS



YUNITA INDRAWATI, AP, MP, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP.19740607 199403 2 002